

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini berusaha mengungkap efektivitas *ASEAN Regional Forum* (ARF) dalam penanganan konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS). ARF ini banyak disoroti eksistensinya karena memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan. Selain untuk mengetahui berbagai ancaman yang ada di kawasan Asia Tenggara, adalah untuk mengukur sudah seberapa efektif peran ARF dalam keamanan kawasan. Tidak hanya dalam bidang keamanan militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional. Bernaung di bawah nama *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN), ARF tetap mengutamakan tahapan-tahapan yang sudah tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan *ASEAN Way*.

Banyak yang mempertanyakan mengenai seberapa besar efektivitas sebuah forum seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan dampaknya bagi keamanan kawasan secara nyata. Efektivitas merupakan sebuah pengertian mengenai ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan sebuah organisasi, jika berhasil maka dapat dikatakan efektif (Mardiasmo 2017, 134). ARF dianggap hanya untuk mencapai kesepakatan formal untuk mengatur tindakan negara yang bersangkutan (Katsumata 2006, 181-198). Sementara, ASEAN juga harus mampu membawa ARF sebagai aktor keamanan kawasan yang bisa berperan efektif.

Topik ini menjadi menarik karena peneliti menyadari bahwa ada banyak keraguan dari berbagai belah pihak yang merasa efektivitas dari adanya *ASEAN Regional Forum* (ARF) (A. D. Ba 2010, 115-130). Rasa pesimis akan tercapainya keamanan yang stabil di kawasan Asia Tenggara masih terasa. Dalam konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) terbilang fenomena lama yang akan selalu membutuhkan pendekatan baru untuk menganalisis konflik tersebut dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Peneliti akan melihat dari pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang akan dilakukan adalah melihat dari sisi seberapa efektif ARF dalam menangani konflik di LTS.

Untuk membangun *Confidence Building Measures* (CBM) antara negara-negara anggotanya, forum dialog ini sudah mengalami masa transisi menuju diplomasi preventif untuk merancang kerja sama yang efektif dan efisien dengan lebih disiplin dalam pengambilan keputusan serta mempertahankan relasi yang sudah ada melalui organisasi eksternal. Dampak regional dari kekuatan global yang meningkat seperti Tiongkok juga harus diperhitungkan. Banyak pengaruh politik Tiongkok atas negara-negara ASEAN seperti melalui klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan, investasi ekonomi dalam proyek-proyek infrastruktur, serta inisiatif pengembangan properti yang dipimpin sektor swasta.

Mengingat Tiongkok adalah salah satu anggota *ASEAN Regional Forum* (ARF), maka tantangan yang datang dari beberapa masalah yang timbul oleh Tiongkok berdampak pada ARF, terutama mengenai Laut Tiongkok Selatan (LTS). Setelah banyak ketegangan yang meningkat di LTS, pengadilan memutuskan bahwa klaim Tiongkok yang didasarkan pada hak-hak historis tidak memiliki

kedudukan di bawah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Di bawah UNCLOS, kegiatan Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina dinilai telah melanggar hak berdaulat Filipina. Pada saat yang sama, dalam pengakuan yang jelas tentang pertarungan reputasi tinggi yang terkait dengan putusan, Tiongkok juga bergerak untuk meyakinkan negara-negara yang sepihak dengannya. Negara-negara itu sebagian besar tidak terlalu berdampak besar sehingga tindakan Tiongkok tersebut dinilai sepihak. Usaha Tiongkok untuk menjadi pengendali di daerah tersebut terus berlanjut dan masih belum jelas apa dampak putusan pengadilan saat ini di daerah yang diperebutkan (Haacke 2009, 83).

Reaksi negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) terhadap hasil putusan pengadilan sangat baik, namun mereka tetap tidak bisa berbuat banyak dan hanya memilih untuk tetap pasif, khususnya Filipina dan Vietnam. ASEAN juga memilih sikap non-eksplisit untuk merespon putusan pengadilan. Reaksi '*silent mode*' ini menggambarkan disposisi yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa negara-negara ini mengizinkan Tiongkok untuk berkuasa di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini menciptakan insentif politik untuk Tiongkok mempertahankan posisinya serta menambah kekuatannya di Laut Tiongkok Selatan. Penyebab lain negara-negara ASEAN tidak terlalu keras merespon tindakan Tiongkok karena tidak ingin merusak aspek hubungan domestik dan ekonomi, serta hubungan lainnya dengan Tiongkok. Namun, seperti yang diketahui negara-negara Asia Tenggara banyak bergantung atau menunggu terlebih

dahulu reaksi dari negara-negara lain, terutama Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat bukan penuntut dalam perselisihan itu (Severino 2010, 435-437).

Karena kebijakannya sangat dinantikan, dan merasa berhak untuk ikut ambil bagian dalam masalah ini karena Amerika Serikat juga salah satu anggota *ASEAN Regional Forum* (ARF), maka Amerika Serikat pada akhir 2015 memulai kembali *Freedom of Navigation Operations* (FONOP) di Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2016 Amerika Serikat melakukan setidaknya dua FONOP di Laut Tiongkok Selatan. FONOP merupakan sarana untuk membuktikan klaim berlebihan yang berpotensi mengancam haknya atas perjalanan yang akan dilakukan melalui Laut Tiongkok Selatan sesuai Pasal 17 UNCLOS. Kebijakan tersebut berbeda jauh dengan negara-negara lain seperti Australia yang telah melakukan patroli pengawasan udara (di bawah *Operation Gateway*). Tiongkok langsung menentang tindakan AS dan melakukan beberapa upaya untuk pindah ke pendekatan yang lebih kompleks (Wortzel 1996, 40-42).

Sengketa wilayah merupakan hal yang sering dibahas dalam Hubungan Internasional dan masih menjadi penyebab konflik tertinggi di dunia. Dalam kasus Laut Tiongkok Selatan ini, sengketa sudah menjadi konflik yang serius sejak tahun 1970-an. Hal ini menjadi perhatian negara-negara yang berada di sekitar Laut Tiongkok Selatan. ASEAN berusaha meredam permasalahan LTS dengan berbagai upaya. Beberapa upaya di antaranya adalah membawa permasalahan LTS ke *ASEAN Regional Forum* (ARF). Di tahun 1994, 2001, dan 2011 ARF menjalankan dialog penting tentang permasalahan LTS (Goh 2004, 50-51).

Dari berbagai upaya dan konferensi yang sudah dilakukan, beberapa di antaranya terdapat tiga kesepakatan. Pertama, *ASEAN Declaration on the South China Sea* pada tahun 1992 yang ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN. Kedua, pada tahun 2002 kesepakatan formal yang dicapai oleh *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) dan Tiongkok adalah *Declaration of the Conduct* (DoC) yang ditandatangani pada tahun 2002. Serta yang ketiga, yang terbaru di tahun 2017 menghasilkan *Framework for the Code of Conduct for the South China Sea* (CoC) pada tahun 2017 yang berisi prinsip-prinsip dan aturan main dalam pengelolaan LTS (Damayanti 2021). Dalam hasil kesepakatan tersebut memuat tentang negara-negara yang sudah menandatangani diwajibkan untuk meminimalkan kegiatan atau aktivitas yang akan mempersulit bahkan dapat menaikkan tensi permasalahan (Haryanto 2017, 88-95).

Deklarasi yang dibuat pada tahun 1992 hanya berisikan persetujuan pihak-pihak dari ASEAN. *Declaration of the Conduct* (DoC) yang ditandatangani pada tahun 2002 disetujui oleh pihak ASEAN dan Tiongkok. Sehubungan dengan skripsi ini akan membahas mengenai konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) di mana melibatkan pihak Tiongkok, maka penulis akan berfokus untuk melihat efektivitas ARF dalam konflik LTS melalui DoC di mana Tiongkok ikut terlibat di dalamnya. Sementara itu, *Code of Conduct* (CoC) yang disusun pada tahun 2017 masih berupa kerangka dan masih akan berproses sehingga pada tahun 2021 COC tersebut dapat ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN dan Tiongkok (Damayanti 2021).

Penelitian ini berfokus pada tiga tujuan *Declaration of the Conduct* (DoC). Pertama, tujuan untuk mempromosikan kemitraan yang berbasis rasa saling percaya

dengan mengembangkan kerja sama yang sudah terjalin. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan kawasan LTS yang harmonis antara ASEAN dan Tiongkok dalam rangka peningkatan perdamaian, stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di kawasan. Ketiga, bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat berkontribusi untuk solusi perselisihan yang damai di antara negara-negara yang bersangkutan (*Association of Southeast Asian Nations* 2012). Mengingat efektivitas memiliki arti ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan sebuah organisasi, jika berhasil maka dapat dikatakan efektif (Mardiasmo 2017, 134). Maka penelitian ini juga melihat bagaimana tujuan-tujuan dari DoC dapat tercapai sehingga dikatakan efektif.

Di samping itu, sebagai bagian dari *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN), wajib bagi *ASEAN Regional Forum* (ARF) untuk memegang teguh *ASEAN Way* sebagai pedoman mereka. Kesuksesan ASEAN menjadi *security community* didasari dari kesepakatan tindakan yang akan diambil bersama untuk menghindari konflik. Sedangkan, hal tersebut tidak dapat diterapkan pada semua anggota ARF. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi ARF, di mana mereka tetap harus menjalankan nilai-nilai yang ada pada ASEAN, tetapi harus tetap mengerti bagaimana nilai yang dimiliki oleh negara-negara di luar ASEAN agar tetap menjadi sepeham dan tidak banyak menimbulkan masalah dalam keanggotaan ARF (Narine 1997, 965-967).

Dengan demikian, hal tersebut bisa dikatakan sebagai kekurangan dari *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) tetapi belum tentu bagi *ASEAN Regional Forum* (ARF). Dalam hal kerja sama, ARF memiliki banyak negara kuat

sebagai anggota (selain ASEAN) dan tidak selalu dihadapkan pada ancaman eksternal yang sama seperti ASEAN karena berasal dari beberapa benua yang berbeda. Dalam hal lainnya, sebuah proses ASEAN yang ada memiliki banyak batasan-batasan dan belum berhasil menyelesaikan konflik secara langsung. Selama ini ASEAN hanya dianggap sebagai sarana atau wadah berdialog saja. Namun, jika dilihat dalam cakupan yang lebih luas, upaya interaksi yang digemari oleh ASEAN ini belum bisa mengatasi masalah keamanan yang dihadapi oleh ARF. Mengingat negara-negara yang menjadi anggota ARF beberapa di antaranya merupakan negara besar dan maju. Secara tidak langsung, semakin besar sebuah negara, semakin banyak tantangan yang dihadapi.

Jika dilihat jauh ke belakang melalui sejarahnya, memiliki metode-metode yang kurang maksimal seperti organisasi regional lainnya bisa dimengerti. Selama periode Perang Dingin, negara-negara ASEAN memandang diri mereka relatif lemah dan terus-menerus dirongrong dalam bahaya melalui tindakan atau pengaruh negara adidaya. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa salah satu pengaruh yang membuat mereka dapat maju dan menguasai kawasan mereka adalah karena mereka memberanikan diri untuk bersatu menjadi bagian dari bagian terdepan diplomatik, sehingga mereka bersedia mengesampingkan konflik mereka dan bekerja sama. Hal ini dapat dilihat dalam masalah tertentu yang mengancam keamanan kawasan bersama dan tentu saja pada tingkat yang masih terbatas.

Konflik internal ASEAN justru merupakan faktor yang mengikat mereka. *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, Konferensi Bali, dan, yang paling penting, tanggapan mereka terhadap invasi Vietnam ke Kamboja telah

menjadi peristiwa yang berperan penting dalam perkembangan ASEAN. Semua permasalahan ini merupakan reaksi atas tindakan yang berpotensi mengancam dari aktor ekstra-ASEAN. Jadi, tanpa adanya ancaman eksternal, sangat kecil kemungkinannya ASEAN akan berevolusi menjadi seperti yang sekarang (Weber 2009).

Jika ada sedikit potensi munculnya ancaman eksternal ke kawasan yang justru akan bertindak sebagai kekuatan pemersatu. Selain itu, dengan adanya negara-negara kuat dalam ARF menjelaskan dinamika yang dimiliki intra-ARF secara fundamental berbeda dengan dinamika yang dijalankan di dalam ASEAN. Berbeda dengan negara-negara anggota ASEAN, kekuatan-kekuatan besar tidak akan sulit untuk bekerja sama atau membuat kompromi. Bagi negara adikuasa, ada sejumlah keuntungan mengikuti jejak ASEAN dalam menciptakan ARF. ASEAN adalah lembaga yang sudah ada dan terbukti yang dapat dimanfaatkan jauh lebih mudah daripada harus membangun struktur baru. Selain itu, sebagai sebuah organisasi di Asia, ASEAN memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk membawa Tiongkok ke kerja sama multilateral daripada lembaga yang diprakarsai oleh Barat. Tiongkok bergabung dengan ARF untuk menghindari ketertinggalannya, sementara AS terus menempatkan sebagian besar kepentingannya dalam pemeliharaan hubungan bilateral.

Sifat dari proses *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) selanjutnya membatasi penerapan pengalaman ASEAN pada *ASEAN Regional Forum* (ARF). Seperti yang terlihat di atas, proses ASEAN dirancang untuk mengatasi masalah yang kontroversial dan bersifat internal. Strategi ini sangat

penting bagi keberhasilan ASEAN sehingga tidak terlihat terlalu memaksakan keberadaannya. Bagaimanapun, ASEAN dapat menawarkan sedikit pedoman kepada ARF tentang bagaimana menangani dan menyelesaikan konflik antara negara-negara anggotanya. ASEAN tidak dapat menangani konflik internal secara langsung karena hal tersebut dapat membahayakan ketahanan institusi dari ketegangan yang dapat timbul. Non-intervensi merupakan salah satu cara dari *ASEAN Way* sehingga hal ini membatasi ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan anggota-anggotanya (Nesadurai 2008).

Mengingat perpecahan politik, budaya, ekonomi, sejarah, dan geografis di antara negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN), sudah banyak hal yang dapat diredam oleh ASEAN. ASEAN telah membuktikan bahwa mereka mampu sedikit meredam iklim politik yang dapat mengurangi kemungkinan perselisihan-perselisihan yang belum terjawab di antara para anggotanya sehingga mungkin dapat mengarah pada konflik yang lebih serius. Asia Tenggara yang kita kenal saat ini tidak akan jauh lebih damai jika bukan karena ASEAN. Namun, meskipun kita mengakui keberhasilan relatif ASEAN dalam situasi Asia Tenggara, hal tersebut tidak bisa terlalu dilebih-lebihkan (Nesadurai 2008).

Namun, implikasi aspek *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) ini telah hilang dalam upayanya untuk menerapkan ASEAN ke *ASEAN Regional Forum* (ARF). Jika ASEAN dapat mengajarkan ARF bagaimana meningkatkan hubungan intra-organisasi seperti yang telah terjadi di dalam ASEAN, tentu saja hal ini akan menjadi pendekatan yang valid. Pada dasarnya, ASEAN memang berbeda dari organisasi internasional yang didorong oleh kepentingan lainnya.

ASEAN merupakan yang paling unik dalam kemampuannya untuk menciptakan kesan persatuan organisasi, suatu kualitas yang tidak akan terlalu diminati oleh kekuatan yang lebih besar di ARF (Weber 2009).

Keberhasilan negara-negara anggota untuk bekerja sama meskipun ada masalah yang diperdebatkan dan menciptakan ilusi kesatuan politik adalah contoh bagaimana proses *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) efektif. Namun, ini juga merupakan contoh bagaimana prosesnya dibatasi. ASEAN telah mengembangkan teknik menerobos, daripada menyelesaikan konflik. Meskipun pendekatan ini telah memungkinkan keberhasilan ASEAN di Asia Tenggara, pendekatan ini mungkin tidak dapat ditiru di berbagai situasi di kawasan Asia-Pasifik. Kualitas atas keberhasilan ASEAN tidak diinterpretasikan dalam ARF. ARF mencakup negara-negara bagian yang paling kuat secara militer di dunia dan mencakup seluruh Lingkar Pasifik. Seperti yang telah kita lihat, ARF merupakan upaya dari ASEAN untuk mencegah marjinalisasi karena kekuatan dari luar berperan mengatur hubungan keamanan di Lingkar Pasifik (Weber 2009).

Dalam hal ini, *ASEAN Regional Forum* (ARF) mencoba untuk memenuhi fungsi yang berguna hanya dalam menyatukan para aktor utama di Asia-Pasifik. Mengingat banyaknya sengketa teritorial dan politik yang menjadi ada di wilayah tersebut, ARF mungkin merupakan cara yang dianggap sederhana namun realistis untuk mendekati beberapa masalah ini. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana pengalaman ASEAN dapat bermanfaat bagi pengembangan ARF. Jika ARF ingin berhasil, ARF harus berkembang dengan caranya sendiri, dan itu mungkin berarti evolusi menjadi organisasi yang didominasi oleh kekuatan besar.

ASEAN dapat memainkan peran konstruktif dalam ARF, tetapi harus berhati-hati untuk tidak membesar-besarkan pengaruhnya atau penerapan pengalamannya pada keanggotaan yang jauh lebih beragam dan keadaan ARF yang berbeda.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana efektivitas *ASEAN Regional Forum* melalui *Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea 2022* dalam meredam dampak konflik di Laut Tiongkok Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui efektivitas *ASEAN Regional Forum* melalui *Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea 2022* dalam meredam dampak konflik di Laut Tiongkok Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk melengkapi aspek di atas, terdapat manfaat penelitian dalam mencapai tujuan penelitian. Manfaat terbagi menjadi dua:

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan dalam Ilmu Hubungan Internasional, serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Pembaca juga diharapkan mendapat manfaat dengan memahami kajian keamanan kawasan serta fungsi dari interregionalisasi. Selain itu, untuk mengetahui dan

memahami seberapa besar pengaruh ARF dalam keamanan kawasan dan bagaimana komitmen kerja sama keamanan kawasan dengan negara-negara lain untuk melawan isu-isu keamanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selanjutnya berkontribusi dalam hal praktis, di mana diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak ARF, sebagai sudut pandang seorang masyarakat ASEAN, serta bahan rujukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah sengketa LTS. Dan juga, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat beberapa negara ASEAN yang terdampak langsung oleh kasus LTS agar dapat terus mengawal kebijakan apa saja yang sudah diambil oleh ARF.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggabungkan metode historis dan revolusi ilmiah dari Morton A. Kaplan dan Hedley Bull yang dianalisis secara kualitatif. Secara subjektif, sejarah merupakan suatu konstruksi yang memiliki makna sebuah bangunan yang disusun oleh penulis sejarah. Susunan tersebut akan menjadi sebuah rangkaian cerita dan membentuk suatu kesatuan unit yang mencakup fakta-fakta yang terangkai secara baik. Hal tersebut sangat penting untuk menggambarkan suatu gejala sejarah baik proses maupun strukturnya (Kartodirjo 1993, 14).

Metode historis memiliki tujuan untuk mendeteksi mengenai pemahaman untuk menyamaratakan berbagai gejala dengan linimasa tertentu. Penyamarataan tersebut meliputi masa lalu, masa sekarang, serta masa depan. Dalam hal ini,

metode historis diperlukan untuk menjadi tolak ukur sebuah rangkaian peristiwa. Peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu dan terselesaikan dengan baik dapat menjadi sebuah solusi yang baik jika peristiwa yang sama terjadi pada masa sekarang atau masa depan.

Metode tersebut sejalan seperti milik Bull (1966) di mana ia beranggapan bahwa pendekatan historis adalah yang berfokus pada norma, nilai, sejarah, dan filsafat. Melalui pendekatan ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi karena memiliki sumber yang banyak dengan mengandalkan pengetahuan sejarah. Sikap tradisional tersebut dicirikan mendasar secara eksplisit tentang pelaksanaan nilai-nilai (Bull 1969, 20-28). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bull memiliki kecenderungan untuk melakukan pendekatan secara historis dalam ilmu hubungan internasional.

Metode revolusi ilmiah yang diuraikan oleh Kaplan (1966) berfokus pada pembuktian hipotesis secara ilmiah. Menurutnya, fokus dari pendekatan ini adalah pada pengamatan sistem dan hipotesis, serta harus benar-benar diuji secara empiris untuk mengetahui kebenarannya. Kaplan menganggap jika pendekatan dilakukan secara terstruktur dan terbukti benar, maka akan jauh lebih mudah untuk mengerucutkan variabel-variabel penelitian yang ada dan lebih objektif.

Jika dilihat secara langsung, kedua metode ini sangat berlawanan. Namun, penulis ingin mengambil kesimpulan dengan menggabungkan kedua metode ini untuk saling melengkapi dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis akan menggunakan pembagian dua variabel:

a. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Pengertian variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen) (Sugiyono 2013, 39). Dalam hal ini variabel independennya adalah aspek dan tujuan pembentukan *ASEAN Regional Forum* (ARF).

b. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Pengertian variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono 2013, 39). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah mengenai efektivitas dari adanya ARF pada konflik LTS.

Jika diaplikasikan dengan gabungan metode milik Bull dan Kaplan, maka variabel independen akan menggunakan pendekatan dengan metode Bull. Penulis akan menjelaskan dengan menggunakan pendekatan historis mengenai aspek-aspek pembentukan ARF. Sedangkan penelitian variabel dependen akan menggunakan metode milik Kaplan. Dengan pendekatan revolusi ilmiah penulis dapat menguraikan secara objektif dan dibuktikan secara ilmiah seberapa besar efektivitas yang dimiliki sejak ARF terbentuk hingga pada konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS).

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi, memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif

melibatkan upaya-upaya penting, seperti menganalisis data dan menafsirkan data secara deskriptif (Creswell 2013, 4).

1.5.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data tertulis yang digunakan juga merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang dapat menjadi acuan bagi skripsi peneliti. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun gambaran langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Data primer akan dilakukan dengan wawancara narasumber Dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti Ph.D.
2. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang akan dilakukan secara maksimal dengan pengumpulan informasi material-material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, jurnal ilmiah, dan sebagainya.
3. Dokumentasi juga merupakan teknik pencarian data sekunder yang dilakukan dengan pencarian data dan informasi dalam bentuk literatur dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dan dari sumber data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

4. Data sekunder yang terakhir adalah wawancara dengan akademisi Risky Oktavian, S.IP., M.A, yang merupakan dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia.



Tabel 1.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Wawancara	(a) Pengumpulan informasi melalui narasumber Dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti Ph.D.	a) Data terkait efektivitas ASEAN dan ARF di kawasan.
Sekunder	Studi Kepustakaan Dokumentasi	<p>(a) Pengumpulan informasi dengan material-material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, jurnal ilmiah, dan sebagainya.</p> <p>(b) Pencarian data dan informasi dalam bentuk literatur dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dan dari sumber data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.</p> <p>(c) Risky Oktavian, S.IP., M.A, dosen Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia.</p>	<p>a) Data terkait pendekatan historis mengenai aspek-aspek dari terbentuknya ARF.</p> <p>b) Data terkait pendekatan revolusi ilmiah untuk membuktikan efektivitas yang sudah dicapai oleh ARF.</p> <p>c) Data terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh ARF dalam menangani konflik yang terjadi di LTS serta berhasil atau tidaknya dari solusi yang ditawarkan oleh ARF.</p>

1.5.3 Teknik Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan harus bersifat valid dan tidak boleh cacat. Oleh karena itu, ada empat tahapan yang diperlukan dalam validasi atau memastikan keabsahan data: (1) *credibility*, (2) *transferability*, (3) *dependability*, (4) *confirmability*. Tahapan pertama yaitu *credibility* bersifat cukup krusial mengingat hal ini tentang derajat kepercayaan dalam hasil penelitian. Karena berbeda dengan kuantitatif yang mengumpulkan data-data langsung dari lapangan atau bersifat empiris, kualitatif harus lebih selektif lagi dalam memilih data mana yang akan dianalisa. Data yang diperoleh harus terkonfirmasi valid dan langkah selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi pada pihak yang memahami hal tersebut melalui wawancara.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2014). Data yang sudah diperoleh diolah dan diuraikan secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang mudah untuk dicerna dan dipahami.

Dalam teknik analisa data kualitatif memiliki empat tahap dalam pengolahannya: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) kesimpulan dan verifikasi. Dalam penulisan skripsi, peneliti menggunakan tahap

awal yaitu pengumpulan data sebagai referensi dalam pengerjaan. Setelah data terkumpul data diolah dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Setelah sudah terkualifikasi dengan baik, data akan disajikan melalui hasil tulisan peneliti hingga memperoleh kesimpulan akhir penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, bab 1 adalah pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 berisikan kajian pustaka terdiri dari revid literatur, kerangka teori, alur berpikir, dan hipotesis. Bab 3 adalah pembahasan yang akan menguraikan pembahasan mengenai efektivitas ARF dalam konflik LTS. Dan bab terakhir adalah bab 4 yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran.